

PERAN PEMERINTAH UNTUK MENCAPAI TUJUAN BANGSA DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI

Penulis :

Agung Nurrahman¹

Afiliasi :

Institut Pemerintahan Dalam Negeri¹

Email :

agung_nurrahman@ipdn.ac.id¹

ABSTRACT

There are three primary aims of this paper. Firstly, it is to analyse proper role theory, especially in government sector. Secondly, this study would examine the role of Indonesian government, according to relevant role theory, in order to achieve nation's goal. Thirdly, this paper would examine the use of technology by Indonesia government in order to achieve that goal. Furthermore, this research using qualitative data collecting methods with descriptive approach and case study strategy.

There are some findings of this study. First, there are four main elements in the theory aspect of the role of the government, especially in Indonesia, namely: One, the political and social contract. Two, the process of deliberation or formulation of public policy that becomes the main point before entering into other points as derivatives. Three, the concept of implementation of public policy, in which there is a dimension of rights and obligations, both for the government and society, as both parties agree on social and political contracts, where both aspects become the fourth and fifth points.

Secondly, the Indonesian government's policy in case studies that researchers use, namely the issue of radicalism, is considered to be contrary to the contract value of the nation and state. This can be further seen in Pancasila related to national unity and unity and social justice. Furthermore, the dynamics of the issue are also contrary to the vision of the ministry of religion, in terms of maintaining intra-religious harmony. Even in the process of drafting a Joint Decree of the ministry related to this issue, not through an appropriate process of public policy formulation.

Thirdly, even if the policy must be taken by the government, it is necessary to take appropriate public policy formulation measures. Moreover, it is beyond the vision and mission of the ministry, campaign promises and the constitution. Therefore, one of the efforts that must be taken to produce good public policy is to provide public spaces availability to participate in the formulation. Where in this case, technology, especially the presence of virtual space as an extension of physical space, has a big part in that. Unfortunately the government does not provide access for the public in this virtual space, and seems to separate certain spaces which creating division of personality.

Keywords: The role of government, the theory of the role of government, technology.

ABSTRAK

Ada tiga tujuan utama dari makalah ini. Pertama, adalah menganalisis teori peran yang tepat, terutama di sektor pemerintahan. Kedua, penelitian ini akan mengkaji peran pemerintah Indonesia, sesuai teori peran yang relevan, guna mencapai tujuan bangsa. Ketiga,

makalah ini akan meneliti penggunaan teknologi oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Adapun peneliti menggunakan metode pengumpulan data kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan strategi studi kasus.

Ada beberapa temuan penelitian ini. Pertama, adanya lima unsur utama dalam aspek teori peran pemerintah khususnya di Indonesia, yaitu: Satu, konsep kontrak politik dan sosial. Dua, proses musyawarah atau perumusan kebijakan publik yang menjadi poin utama sebelum masuk ke poin lainnya sebagai turunannya. Tiga, konsep implementasi kebijakan publik, dimana didalamnya terdapat dimensi hak dan kewajiban, baik untuk pemerintah maupun masyarakat, sebagai kedua belah pihak yang menyepakati kontrak sosial dan politik, dimana kedua aspek tersebut menjadi poin keempat dan kelima.

Kedua, kebijakan pemerintah Indonesia dalam studi kasus yang peneliti gunakan, yakni isu radikalisme, dinilai muatannya bertentangan dengan nilai kontrak bangsa dan negara. Hal ini lebih jauh dapat dilihat pada konstitusi pancasila terkait kesatuan dan persatuan bangsa serta keadilan sosial. Selanjutnya isu tersebut tidak sesuai dengan janji kampanye pemerintahan Jokowi. Lebih jauh lagi, dinamika isu tersebut juga bertentangan dengan visi kementerian agama, dalam poin menjaga kerukunan ummat intra agama. Bahkan dalam proses penyusunan Surat Keputusan Bersama kementerian terkait isu ini, tidak melalui suatu proses perumusan kebijakan publik yang tepat.

Ketiga, walaupun kebijakan tersebut harus diambil oleh pemerintahan, tentu perlu dilakukan suatu langkah-langkah perumusan kebijakan publik yang sesuai. Terlebih lagi hal tersebut berada diluar visi misi kementerian, janji kampanye dan konstitusi. Maka, salah satu upaya yang harus ditempuh untuk menghasilkan kebijakan publik yang baik adalah dengan memberikan ruang-ruang publik untuk dapat berpartisipasi didalam perumusan tersebut. Dimana dalam hal ini, teknologi, khususnya kehadiran ruang virtual sebagai perpanjangan ruang jasad, memiliki andil yang besar dalam hal tersebut. Sayangnya pemerintah tidak menyediakan akses bagi publik di ruang virtual ini, dan terkesan memiliki keterpisahan kepribadian dari refleksi keterpisahan beberapa ruang.

Kata kunci: Peran pemerintah, teori peran pemerintah, teknologi.

PENDAHULUAN

The legal and political relation of state is analytically distinct from the cultural community of the territorial relation kinship, the nation.¹ Demikianlah definisi bangsa yg disampaikan oleh Steven Grosby, dimana sebenarnya sebuah bangsa merupakan suatu hal kultural yg sangat berbeda dari negara yg dikenal memiliki kekuatan politik dan hukum secara resmi. Dari penjelasan singkat ini setidaknya terdapat poin penting yang perlu difahami bahwa terdapat garis pembeda antara negara dengan bangsa, dan salah satunya adalah aspek hubungan geografis, sejarah, dan tentunya budaya.

Adapun Grosby menjelaskan lebih jauh dalam bukunya tersebut, bahwa sebuah negara secara umum dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur yang, melalui suatu institusi, menjalankan kedaulatan terhadap sebuah daerah menggunakan suatu hukum yg berlaku atas

¹ Grosby, S. (2005). Nationalism: A very short introduction. Oxford University Press, hal: 35

individu-individu dalam wilayah tersebut sebagai bagian dari negara. Dalam hal ini perlu digarisbawahi bahwa entitas negara dapat ada dan berdiri atas dasar kedaulatan terhadap elemen pembangun negara tersebut. Sehingga unsur pembangun elemen tersebut haruslah diperhatikan secara seksama, mengingat bahwa jika terdapat kecacatan dalam unsur pembangun elemen kedaulatan sebuah bangsa, maka disanalah terdapat absurditas dari entitas negara atas warga negaranya.

Dari pandangan kritis tersebut, sebuah negara haruslah selalu berhati-hati dan mawas diri, agar dirinya selalu berada dalam rel konsep kedaulatan yang tepat. Hal tersebut dikarenakan sebuah negara haruslah mengingat bahwa dirinya tidak lahir dari suatu kondisi yang hampa atau kekosongan. Melainkan sebuah negara lahir dari sebuah kondisi dan dinamika sejarah dan kultural yang terjadi dalam suatu ranah geografis yang ditinggali oleh suatu masyarakat. Sehingga perlu difahami, bahwa sebelum suatu negara itu lahir, telah terdapat entitas- entitas lain yang mendahului dan bahkan menjadi faktor kelahiran sebuah negara pada alam realitas ini.

Adapun kategori ketepatan pada konsep kedaulatan yang dimaksud, setidaknya perlu memenuhi kategorinya. Maka sebelum beranjak pada kategori tersebut, perlu didudukkan dengan baik konsep kedaulatan yang dimaksud. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia konsep kedaulatan berakar dari kata *daulat*, yang berasal dari bahasa arab, yang bermakna pemerintahan atau negara, adapun kekuasaan sebagai derivasinya dianggap juga mewakili definisi kedaulatan tersebut. Sehingga sebetulnya dalam konteks penggunaan bahasa Indonesia, konsep tersebut lebih tepat merupakan pengulangan dari konsep negara itu sendiri. Adapun jika merujuk pada konsep barat, konsep yang dekat diwakili oleh kata *sovereignty*.

Dalam bagian buku *State sovereignty as a social construction* terdapat empat kategori utama mengenai konsep kedaulatan ,yaitu: adanya wilayah, populasi, otoritas dan pengakuan.² Lebih jauh didalam buku tersebut dijelaskan bahwa sebenarnya kedaulatan negara atau kekuasaannya merupakan suatu bangunan sosial, dimana poin penting dari keseluruhan poin tersebut terletak pada aspek pengakuan internal masyarakat yang

² Biersteker, T. J., & Weber, C. (2011). The social construction of state sovereignty. In *State Sovereignty as Social Construct* (pp. 1–21). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511598685.001>

merupakan bagian dari negara tersebut. Poin terakhir ini yang justru sebenarnya seringkali tidak difahami secara mendalam oleh kebanyakan orang, khususnya para politisi. Terlebih lagi poin ini cenderung direduksi dalam kebanyakan narasi sejarah, khususnya di Indonesia, bahwa aspek pengakuan cenderung disematkan pada dunia internasional, atau negara lain diluar negara yang dimaksud. Tanpa bermaksud mengecilkan peran pengakuan negara lain, justru peran pengakuan internal dari masyarakat pembangun entitas negara itulah yang tidak kalah penting, bahkan pada perjalanan jangka panjang sangat dibutuhkan oleh entitas negara itu sendiri.

Salah satu bentuk keberjalanan jangka panjang negara tersebut ditandai dengan efektifitas penyelenggaraan negara. Efektifitas tersebut tentunya memiliki konsekuensi tuntutan-tuntutan yang perlu dibebankan pada masyarakat sebagai suatu bagian pembangun entitas negara. Diantara tuntutan tersebut diantaranya adalah kebutuhan negara untuk memiliki keseragaman untuk kemudahan pengaturan masyarakat, diantaranya adalah standardisasi komunikasi, bahasa, dan text. Tentunya penyeragaman tersebut membutuhkan upaya segenap elemen dari entitas negara untuk menuju kearah tersebut, disanalah komitmen masyarakat pengusung entitas tersebut diuji.³ Ditambah lagi bagaimana upaya suatu negara dalam mencapai suatu tujuan negara yg disepakati bersama bangsanya, ujian tersebut akan menunjukkan bagaimana kualitas hubungan bangsa dan negara.

Tujuan negara yang baik dan benar merupakan gambaran dari impian suatu bangsa terhadap entitas negara tersebut yang disepakati bersama. Bentuk kesepakatan tersebut yang kini dikenal sebagai konstitusi. Disinilah dasar bangsa-negara dan landasan filosofis suatu negara untuk bergerak menyelenggarakan pemerintahan dengan kekuasaannya. Maka daripada itu, keberjalanan pemerintahan, khususnya Indonesia perlu dicek dan diukur kembali berdasarkan landasan filosofis tersebut, sebagai ukuran hubungan bangsa-negara.

Jika suatu negara menyelenggarakan negara selaras dengan filsafat kenegaraannya, yang juga tercermin dalam konstitusinya, sebagai kesepakatan dari bangsanya untuk mengakui negara dan memberikan otoritas terhadapnya, maka keberjalanan entitas negara tersebut dalam jangka panjang akan menemukan jati dirinya melebur bersama bangsanya, dengan kata lain keberjalanan penyelenggaraan pemerintahan oleh negara hampir tidak akan

³ Op.cit, hal: 23

menemui hambatan yang berarti secara internal. Namun juga sebaliknya, jika suatu negara cenderung mengalami banyak tuntutan dari internal bangsanya, bisa jadi dimungkinkan negara tersebut tengah menyelenggarakan pemerintahan tidak berlandaskan kesepakatan negara-bangsa tersebut.

Persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang menarik dibahas dalam penelitian ini, hal tersebut terkait dengan perkembangan kondisi masyarakat Indonesia yang kini semakin terpolarisasi. Adapun polarisasi yang terjadi bukan hanya pada aspek politik namun juga mulai merembes pada aspek kultural bahkan kebangsaan. Dimana sebelumnya polarisasi ditengah masyarakat hanya terjadi dikarenakan terdapat dua kubu pilihan politik, yakni Jokowi-prabowo, namun kini polarisasi tersebut cenderung membawa kepada keterbelahan masyarakat yang lebih jauh. Salah satu bentuknya adalah bagaimana penyelenggaraan pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi cenderung untuk memarjinalisasikan kelompok mayoritas dan membawa isu-isu yang tidak relevan dengan kemajuan bangsa, namun justru semakin mendorong perpecahan ditengah bangsa. Diantara isu tersebut yang hingga kini masih digencarkan adalah isu radikalisme dan sekularisme yang cenderung dikembangkan ditengah masyarakat. Padahal masih banyak persoalan yang sebenarnya lebih prioritas dan menyatukan bangsa ini, misalnya seperti masalah perkembangan ekonomi dan korupsi.

Disamping hal tersebut, peneliti juga menyoroti penggunaan teori peran yang hingga kini masih menjadi persoalan dalam dunia akademik, khususnya penggunaan dalam ranah pemerintahan. Karena teori peran sejatinya merupakan konsep yang ada dan berlaku dalam riset sosiologi. Hal tersebut didasarkan pada suatu asumsi bahwa setiap aktivitas harian suatu individu berdasarkan suatu kategori sosial tertentu yang juga berkorelasi terhadap setiap peran entitas lain yang terkait.

Persoalannya, aspek kategorisasi tersebut belum menuai kesepakatan para sosiolog, sehingga dalam dunia sosiologi pun teori peran ini masih mengalami perdebatan. Salah satunya, terdapat perdebatan substansial dalam sosiologi tentang definisi konsep kunci dari teori peran. Seperti dijelaskan oleh Michelle bahwa perdebatan substansial dari teori peran setidaknya terdapat pada konsep peran itu sendiri. sebuah peran dapat didefinisikan sebagai sebuah posisi sosial., tingkah laku yang berkaitan dengan posisi sosial, atau tingkah

laku khusus.⁴ Oleh karenanya, peneliti juga menilai bahwa mendudukan teori peran dalam konteks pemerintahan sangat perlu untuk dilakukan, khususnya terkait dengan filsafat bangsa beserta mandatnya pada negara.

Lebih jauh lagi, kekosongan riset mengenai penjelasan konsep peran pemerintah dalam perkembangan teknologi menjadikan penelitian ini sangat menarik dan cukup penting untuk dilakukan. Karena sesungguhnya teknologi dimaknai salah satunya sebagai perkembangan dunia virtual dan digital, yang sejatinya merupakan perpanjangan dari dunia fisik atau jasad yang nyata. Hal ini perlu ditekankan mengingat terdapat kecenderungan yang tinggi keterlepasan antara ruang jasad dengan ruang virtual atau maya sebagaimana dijelaskan secara lebih jauh oleh seorang ahli pengkajian budaya, Mark Slouka.⁵

Terkait dengan hal tersebut, sudah sepatutnya pemerintah memerankan dirinya dalam dunia maya. Seperti yang dikatakan oleh Thomar R. Dye bahwasannya pemerintah itu memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, baik disadari atau tidak, dimana hal tersebut merupakan suatu hal yang dinamakan sebagai kebijakan publik.⁶ Maka jika sekalipun pemerintah tidak mengambil sikap dalam dunia maya, maka sebenarnya pemerintah telah melaksanakan perannya tanpa disadari dengan memilih untuk bersikap pasif, atau bahkan bisa jadi bersikap kontraproduktif terhadap pencapaian tujuan bangsa. Dugaan tersebut yang ingin peneliti coba untuk ungkapkan dalam penelitian ini sebagai hal yang sangat penting, khususnya di era perkembangan teknologi dan dunia maya ini.

METODE

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun metode tersebut peneliti gunakan terkait dengan sifat alami dari penelitian ini. Pertama, penelitian ini bersifat kualitatif daripada kuantitatif dikarenakan data yang peneliti ambil lebih banyak menggunakan narasi dibandingkan data secara angka. Kedua, data yang peneliti ambil cenderung bersifat primer sekaligus sekunder. Adapun peneliti menyatakan data primer karena peneliti mengumpulkan serakan data yang ada di internet

⁴ Hindin, Michelle J. 2007. "Role theory." Pp. 3959–62 in *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*, edited by G. Ritzer. Blackwell Publishing.

⁵ Slouka. Mark, 1999, *Ruang Yang Hilang: Pandangan Humanis Tentang Budaya Cyberspace Yang Merisaukan* (terj), Bandung: Penerbit Mizan.

⁶ Dye, Thomas. R. (2017). *Understanding Public Policy*. In *Understanding Public Policy*. hal: 333

sebagai salah satu aspek teknologi, yaitu ruang virtual, sebagai perpanjangan ruang jasad. Lebih jauh lagi, peneliti menggunakan strategi studi kasus memfokuskan penelitian.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mendudukan Teori Peran

Beranjak dari kurangnya kejelasan dan perdebatan para sosiolog dari teori dan konsep peran itu sendiri dalam sosiologi. Hal tersebut berdampak pada penggunaan konsep tersebut pada banyak bidang lainnya. Adapun peneliti memfokuskan pada seperti penelitian di aspek pemerintahan, dimana tidak sedikit peneliti yang mengambil judul atau tema peran pemerintahan dalam tulisan ilmiahnya. Dari sekian banyak tulisan mengenai hal tersebut, peneliti mengambil contoh penelitian praja atau mahasiswa di IPDN yang melakukan riset dengan judul peran di ranah pemerintahan. Adapun salah satu alasan pengambilan data tersebut dikarenakan kampus IPDN merupakan kampus dibawah kementerian Dalam Negeri yang idealnya memahami secara baik konsep peran pemerintah dan penggunaannya.

Dari data yang peneliti dapatkan, beberapa persoalan. Pertama, dari 39 judul peran angkatan 27 terdapat setidaknya satu per tiga, penggunaan konsep peran seringkali hanya muncul di awal saja, atau lebih tepatnya hanya sekedar menjadi judul. Adapun mengenai alasan mengapa tidak dimasukkannya teori peran sebagai alat analisa, hal ini memerlukan penelitian lebih jauh. Namun, temuan ini menjadi hal yang menarik dikarenakan seharusnya konsep yang dibahas dalam judul mengambil posisi yang cukup dominan dalam pembahasan penelitian.

Persoalan kedua, satu per tiga dari 39 penelitian tersebut, peneliti menilai bahwa walaupun para penulis -dalam hal ini mahasiswa- menggunakan teori atau konsep peran, maka teori atau konsep yang dimaksud cenderung kurang tepat sebagai alat analisa. Salah satu bentuk ketidaktepatan itu adalah penggunaan teori peran yang sangat umum tanpa memiliki keterkaitan secara khusus dengan konsep pemerintahan. Padahal dalam teori peran itu sendiri para sosiolog memberikan beberapa kategori penggunaan dalam beberapa konteks dan kondisi. Lebih jauh lagi, penjelasan konsep peran sosial disana merupakan penjelesaian secara umum. Adapun jika dirujuk langsung pada sumber buku dimaksud, maka dapat dilihat bahwa

⁷ Geddes, Barbara (2003).Paradigms and Sand Castles. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.p. 117.doi:10.3998/mpub.11910 (<https://doi.org/10.3998%2Fmpub.11910>).ISBN 978-0-472-09835-4

sebenarnya penjelasan yang dimaksudkan oleh penulis tidak dalam konteks untuk menjelaskan peran sosial dalam konteks pemerintahan secara khusus.

Oleh karenanya peneliti mencoba memformulasikan suatu konsep dan teori peran ini langsung pada sumber-sumber primer teori peran secara sosiologis. Salah satunya adalah konsep peran sebagaimana yang dijelaskan oleh B.J. Biddle bahwa hal tersebut merupakan karakter dan perilaku sosial secara natural.⁸ Disamping itu, sosiolog lain memiliki pandangan bahwa konsep peran merupakan suatu bagian dari struktur sosial yang untuk dijalani atau dimainkan yang disebut sebagai teori peran struktural.⁹ Adapun sebagian sosiolog cenderung melihat suatu peran dalam kerangka organisasi yang stabil dan rasional, dimana konsep ini cenderung untuk melihat peran menjadi lebih kaku yang lebih banyak diadopsi untuk mengelola konflik yang dekat dengan teori peran organisasi.¹⁰

Adapun peneliti menilai dari penjelasan-penjelasan tersebut diatas, bahwa konsep peran sebagai suatu tinjauan sosiologis pada dasarnya tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya konsep Mandel memahami bahwa teori peran struktural bergantung pada naskah struktur sosial yang seringkali sebenarnya tidak tertulis, namun keberadaanya cenderung untuk diakui, dimana kesepakatan tersebut seringkali disebut sebagai norma. Adapun untuk teori peran organisasi, peneliti melihat bahwa kondisi yang dibuat untuk suatu stabilitas memiliki suatu kecenderungan yang dekat penyandaran pada aturan yang dibuat secara internal untuk lebih dapat beradaptasi terhadap suatu masalah. Jadi untuk melakukan peninjauan suatu peran dari suatu entitas atau individu, hal ini harus dikorelasikan terhadap individu atau entitas lainnya.

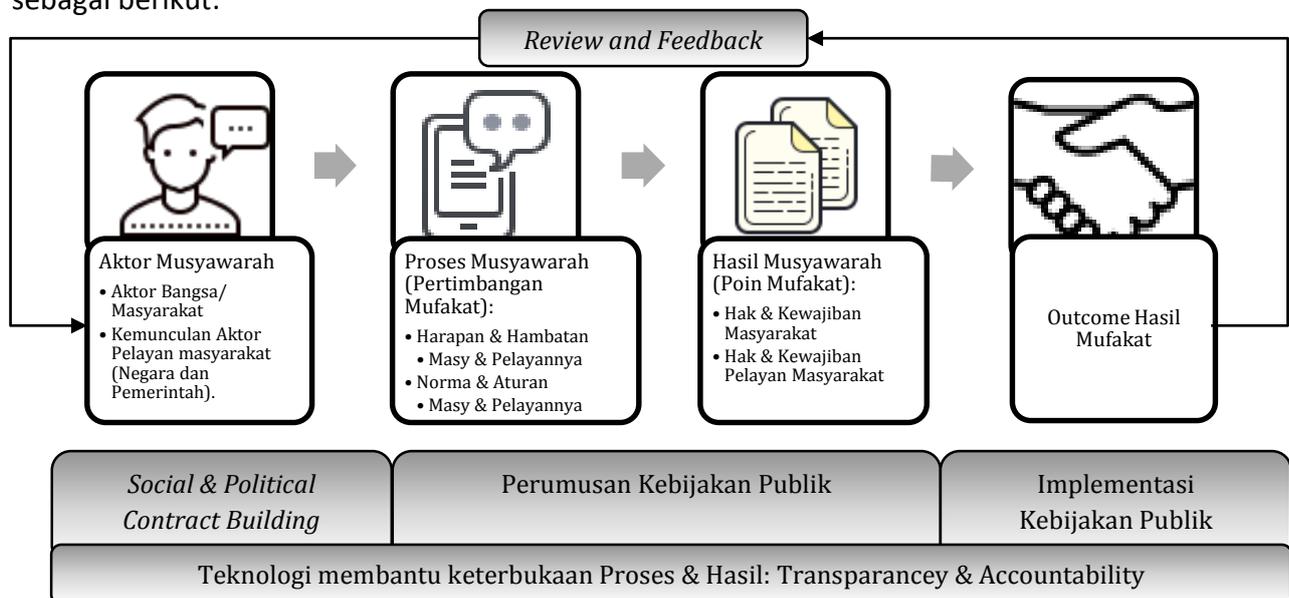
Sehingga jika ditinjau pada konteks pemerintahan, konsep peran yang ditinjau pada entitas pemerintahan harus mampu berkorelasi dengan entitas lainnya, khususnya entitas yang mengangkat dan mengadakan negara atau pemerintahan tersebut, yaitu masyarakat. Adapun tinjauan peran suatu masyarakat dan suatu negara atau pemerintah, dilihat dari tolak ukur kesepakatan kedua belah pihak entitas secara khusus, dan pertimbangan keumuman

⁸ Burt, R. S. 1982. *Toward a Structural Theory of Action: Network Models of Social Structure, Perception, and Action*. New York: Academic

⁹ Mandel. M. J. 1983. Local roles and social networks. *American Sociological Review*. 48:376-86

¹⁰ Fisher, C. D . , Gitelson, R. 1983. A metaanalysis of the correlates of role conflict and ambiguity. *J. Applied Psychology*. 68:320-33

lainnya jika diperlukan. Oleh karenanya peneliti membangun sebuah teori peran pemerintah sebagai berikut:



Gambar 1 Teori Peran Pemerintah

Dari teori diatas peneliti kemudian meninjau bagaimana peran pemerintah dalam pencapaian kontrak politik dan sosial, atau tujuan bangsa, dengan pemanfaatan teknologi. Adapun peneliti menggunakan konsep musyawarah sebagai bentuk perwujudan dari filsafat bangsa, yaitu Pancasila yang mengedepankan proses musyawarah dalam pencarian suatu jawaban atas pertanyaan dan solusi atas masalah kolektif. Adapun penjelasan dibawahnya mengenai konsep kebijakan publik adalah untuk mempermudah para akademisi pemerintahan dalam memahami konsep yang peneliti maksud.

Untuk menguji konsep tersebut secara sederhana peneliti mengambil sebuah studi kasus mengenai isu yang cenderung memenuhi ruang-ruang virtual, sebagai salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi saat ini. Adapun salah satu isu yang masih dikedepankan oleh pemerintahan jokowi adalah isu radikalisme, dimana hal ini cukup memicu pro dan kontra di berbagai khalayak. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk menjadikan isu tersebut sebagai contoh.

Pembangunan kontrak politik dan sosial

Adapun terkait uji konsep pertama adalah mengenai konsep pembangunan kontrak politik dan sosial. Peneliti mendapati bahwa salah satu bentuk mencuatnya persoalan kegaduhan di ranah publik baik ruang jasad maupun virtual adalah tidak sedikitnya tokoh publik yang menilai

bahwa pengangkatan isu radikalisme ini sudah bermasalah. Tentunya tidak tepatnya mendudukkan dan mengangkat suatu isu akan memiliki dampak turunan yang juga akan keliru. Pertama, Salah satu bentuk konkrit political contract atau kesepakatan politik -yang sebenarnya secara ideal terbentuk sebagai hasil dari musyawarah untuk Indonesia- antara pemerintah dan masyarakat adalah janji kampanye. Dimana kontrak tersebut merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai jalannya pemerintahan. Adapun kenyataannya di ruang jasad yang diperpanjang dengan ruang-ruang virtual tentang langkah pemerintah, peneliti menemukan hal yang tidak sejalan dengan idealitas tersebut. Tidak ada diantara satu pun kontrak politik yang disepakati dari pemerintahan Jokowi untuk pemberantasan radikalisme. Disamping itu isu tersebut bukanlah suatu hal yang darurat untuk bangsa ini layaknya Covid-19. Bahkan pandemi virus tersebut memiliki dampak yang jauh lebih nyata dan mendasar bagi bangsa dan negara ini.

Hal tersebut dikuatkan dengan pendapat pendapat salah seorang tokoh bangsa, Hidayat Nur Wahid setelah menghadiri pembukaan Silaknas ICMI di Auditorium Universitas Negeri Padang pada hari Jumat, bahwasannya "Jangan membuat program-program yang tidak ada dalam janji kampanye. Radikalisme tidak ada loh dalam janji kampanye. Tapi sekarang seolah-olah ini kabinet anti radikalisme,".¹¹

Argumentasi lainnya adalah pada ketidaksesuaian antara perguliran isu radikalisme yang membuat gaduh dan meningkatkan gesekan bangsa dengan negara terhadap tujuan negara yang secara umum seharusnya menciptakan kedamaian bagi hubungan bangsa dengan negara. Secara khusus, hal ini juga bertolak belakang terhadap visi misi kementerian agama yang dijadikan sebagai salah satu corong narasi isu ini. Dapat dilihat pada dokumen Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 bahwa visi Kementerian Agama Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Sedangkan pada misi kedua adalah memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama¹²

¹¹ Firmansyah, T. (2020, Desember 07). <https://nasional.republika.co.id/?url=https%3A%2F%2Fnasional.republika.co.id%2Fberita%2Fq23inu377%2Fpemerintah-disarankan-tak-hanya-sibuk-isu-radikalisme>. Retrieved from nasional.republika.co.id.

¹² Kementerian Agama RI. (2017). <https://kemenag.go.id/home/artikel/12433/visi-misi>. Retrieved from kemenag.go.id.

Perumusan Kebijakan Publik

Dari data tersebut, terdapat kecenderungan bahwa dalam perumusan kebijakan mengenai isu radikalisme tidak melalui suatu proses yang tepat. Adapun indikator ketepatan tersebut seperti yang telah dijelaskan dalam gambar sebelumnya, bahwa harus terdapat keterbukaan dalam proses perumusannya. Lebih jauh lagi tingkat keterlibatan publik sebagai dampak dari keterbukaan tersebut akan menyempurnakan proses yang baik tersebut, dimana peneliti tidak mendapatkan data mengenai pembukaan ruang-ruang akomodasi persepsi publik, baik tokoh bangsa, masyarakat dan akademisi. Begitu pula partisipasi masyarakat pun tidak ditemukan dalam proses pembuatannya baik di ruang jasad maupun virtual. Adapun salah satu bentuk kebijakan pemerintah terhadap isu radikalisme tersebut adalah kemunculan Surat Keputusan Bersama beberapa kementerian.

Ketiadaan peran publik, khususnya akademisi, menimbulkan kecacatan pada aspek hukum dari SKB tersebut. seperti dijelaskan oleh kata Sekretaris Kaukus Kebebasan Akademik Indonesia (KKAI) DrHerlambang P Wiratraman dalam siaran persnya yang diterima Jember, Jawa Timur, Kamis ia menyatakan bahwa: "Bila tidak (pernah) ada basis evaluasi yang bisa dipertanggungjawabkan, khawatirnya dalam praktik, justru terjadi kesewenang-wenangan antar-hirarki di internal jajaran pemerintahan yang justru bertolak belakang dengan semangat membangun integritas dan profesional ASN," ia menambahkan bahwa: "Keputusan pemerintah tentang SKB itu justru melahirkan kesewenang-wenangan, serta memperlihatkan negara kian menjauh dari prinsip negara hukum,"¹³

Selanjutnya, ketiadaan peran publik tersebut semakin meningkatkan kecenderungan peluang-peluang otoritarianisme dan menihilkan keberadaan konsep musyawarah dan demokrasi yang seharusnya dijunjung oleh negara ini. Hal tersebut seperti disampaikan oleh Salah satu poin yang disoroti Komisioner Komnas HAM Choirul Anam yakni soal aturan bagi ASN mengkritik pemerintah. saat konferensi pers di kantornya, "Di pengaturan soal apa yang disebut melanggar SKB? di posisi angka satu, dikatakan bahwa tidak boleh mengkritik pemerintah. Itu sebenarnya tidak bisa,"¹⁴

¹³ Solichah, Z. (2019, November 28). www.antaranews.com/berita/1185132/pusat-studi-dan-akademisi-mengkritik-skb-penanganan-radikalisme. Retrieved from antaranews.com

¹⁴ Halim, D. (2019, 11 28). <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/29/13405321/komnas-ham-kritik-skb-11-menteri-soal-penanganan-radikalisme-di-lingkungan>. Retrieved from nasional.kompas.com.

Lebih jauh lagi, peneliti menilai bahwa kecacatan produk Surat Keputusan Bersama para menteri ini diduga juga berawal dari basis keilmiah konsep radikalisme itu sendiri yang tidak jelas. Dikarenakan sebenarnya definisi dan jenis radikalisme itu sendiri tidak sedikit. Adapun untuk lebih memperjelas persoalan ini diperlukan penelitian khusus dan lanjutan untuk memahami secara lebih jelas.

Keterpisahan ruang jasad dan ruang virtual

Teknologi, dalam hal ini adalah ruang virtual, seharusnya menjadi perpanjangan ruang jasad. Salah satu refleksi dari hal tersebut adalah suatu konsistensi sikap dan perilaku yang ada di ruang jasad seperti demikian adanya dalam ruang virtual. Dalam kasus ini, peneliti mendapati bahwasannya pemerintah memiliki keterbelahan kepribadian, yang dicirikan dengan sikap dan perilaku tersebut dalam ruang yang berbeda.

Hal tersebut dapat dimaknai dari pernyataan seorang Menteri Agama, Fachrul Rozi, ketika ia membuat kegaduhan di ranah publik mengenai faktor radikalisme yang tidak ilmiah, bahwasannya ia membuat pernyataan bahwa faktor radikalisme itu berasal dari para penghafal Al-Quran yang mampu berbahasa arab dengan baik serta memiliki paras yang good looking. Walaupun ia kemudian meminta maaf, namun konteks permintaan maaf itu bukan pada substansinya, melainkan pada aspek ruang jasad dimana ia bicara. Adapun berikut penjelasannya: "Perlu saya garis bawahi, saya mohon maaf tidak tahu itu menjadi konsumsi publik, saya kira itu internal ASN." Ia menambahkan bahwa: "Jadi kembali, satu mungkin salah di saya karena saya tidak tahu bahwa ini forum publik. Saya berbicara pada internal ASN, saya menggaris bawahi itu, tapi saya menegur Menteri nggak boleh lagi lah, sudah terlanjur ngomong, saya bilang 'gimana pak menteri PAN-RB, saya kira internal kok ditayangin gitu'. Tapi ya salah saya, mustinya saya punya kewaspadaan itu," imbuhnya. ujar Fachrul di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (8/9/2020).¹⁵

Maka daripada itu tidak mengherankan hal tersebut menuai kegaduhan di kalangan masyarakat. Masalah kedua, karakter pemerintah juga dinilai publik mudah untuk mengklaim dan melakukan penuduhan terhadap pihak yang dinilai pemerintah terpapar paham radikalisme. Hal tersebut seperti disampaikan oleh Ketua Umum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), yakni Jimly Ashshidqie yang menyatakan bahwa "Pemerintah harus

¹⁵ Widiari, G. T. (2020, September 08). <https://era.id/nasional/37387/menteri-agama-salahkan-tjahjo-kumolo-karena-publikasikan-radikalisme-%E2%80%A6>/2. Retrieved from era.id

mendengarkan suara-suara yang luas dari bawah. Jangan hanya memandangi dari langit. Ini istilah radikalisme sudah terlalu melebar kemana-mana," Ia juga menambahkan bahwa radikalisme yang dipahami dan dipersepsikan saat ini hanya membawa pada pembelahan umat beragama dan berbangsa yang terjadi akibat sikap pemerintah jangan terlalu dini dan sering menuduh tanpa landasan yang jelas.¹⁶

KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah pusat memiliki kecenderungan untuk menggunakan teknologi, namun hal tersebut berkorelasi negatif terhadap pencapaian tujuan bangsa, dikarenakan terdapatnya dua keterpisahan: pertama antara ruang jasad dengan ruang virtual, kedua antara negara dengan bangsanya. Hal tersebut setidaknya dikarenakan dua hal, yaitu: pertama, kecenderungan kurang difahaminya kontrak politik dan sosial antara negara dengan bangsanya. Kedua, belum dilaksanakannya secara baik proses perumusan kebijakan publik dengan melibatkan elemen masyarakat serta dengan memanfaatkan ruang-ruang virtual sebagai bentuk teknologi untuk mendorong keterbukaan. Ketiga, dikarenakan proses yang kurang baik, maka outcome positif dari implementasi kebijakan tersebut sendiri juga tidak dirasakan oleh masyarakat secara positif. Justru sebaliknya, hal tersebut memicu gejolak dan disintegrasi bangsa. Sehingga pemerintah harus meningkatkan perannya dalam memimpin dan melayani masyarakat dengan melakukan setidaknya tiga hal, yaitu: pertama kesadaran diri pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang bertindak berdasarkan kesepakatan politik dan sosial. Kedua, melibatkan masyarakat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakannya, khususnya dengan pemanfaatan teknologi untuk mendorong keterbukaan. Ketiga, memiliki integritas untuk bersikap secara konsisten pada setiap jenis ruang kehidupan, termasuk ruang virtual yang dimaknai sebagai perpanjangan ruang jasad, bukan sebagai keterpisahan.

REFERENCES

Biddle, B. (1986). Recent Developments in Role Theory. *Annual Review of Sociology*, 12(1), 67–92. doi:<https://doi.org/10.1146/annurev.soc.12.1.67>

¹⁶ Fachri, F. (2019, Desember 07). <https://nasional.republika.co.id/berita/q24cww423/jimly-sebut-penggunaan-istilah-radikalisme-sudah-melebar>. Retrieved from nasional.republika.co.id.

- Biersteker, T. J. (2011). *The social construction of state sovereignty*. In *State Sovereignty as Social Construct*. Cambridge University Press. doi:<https://doi.org/10.1017/cbo9780511598685.001>
- Burt, R. S. (1982). *Toward a Structural Theory of Action: Network Models of Social Structure, Perception, and Action*. New York: Academic.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy*. In *Understanding Public Policy*. Pearson Education, Inc.
- Fachri, F. (2019, Desember 07). <https://nasional.republika.co.id/berita/q24cww423/jimly-sebut-penggunaan-istilah-radikalisme-sudah-melebar>. Retrieved from nasional.republika.co.id.
- Firmansyah, T. (2020, Desember 07). <https://nasional.republika.co.id/?url=https%3A%2F%2Fnasional.republika.co.id%2Fberita%2Fq23inu377%2Fpemerintah-disarankan-tak-hanya-sibuk-isu-radikalisme>. Retrieved from nasional.republika.co.id.
- Fisher, C. D. (1983). A metaanalysis of the correlates of role conflict and ambiguity. *Journal of Applied Psychology*, 68:320-33.
- Geddes, B. (2003). *Paradigms and Sand Castles*. (A. Arbor, Ed.) MI: University of Michigan Press. doi:[doi:10.3998/mpub.11910](https://doi.org/10.3998/mpub.11910)
- Grosby, S. (2005). *Nationalism: A very short introduction*. Oxford University Press.
- Halim, D. (2019, November 28). <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/29/13405321/komnas-ham-kritik-skb-11-menteri-soal-penanganan-radikalisme-di-lingkungan>. Retrieved from nasional.kompas.com.
- Hindin, M. J. (2007). *The Blackwell encyclopedia of sociology*. (G. & Ritzer, Ed.) Blackwell Publishing.
- J., M. M. (1983). Local roles and social networks. *American Sociological Review*, 48:376-86.
- Kementerian Agama RI. (2017). <https://kemenag.go.id/home/artikel/12433/visi-misi>. Retrieved from kemenag.go.id.
- King, G., Keohane, R. O., & Verba, S. (1994). *Designing Social Inquiry*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. doi:[doi:10.1515/9781400821211](https://doi.org/10.1515/9781400821211)

- Moreno, J. L. (2020). Role Theory. In *Encyclopedia of Personality and Individual Differences* (pp. 4512–4512). doi:https://doi.org/10.1007/978-3-319-24612-3_302281
- Shaw, M. E. (Shaw, M. E., & Costanzo, P. R. (Duke U. (2012). Theories of Social Psychology, second edition (Vol. 1).). *Theories of Social Psychology, second edition (Vol. 1)*. 2012: Duke University.
- Slouka, M. (1999). *Ruang Yang Hilang: Pandangan Humanis Tentang Budaya Cyberspace Yang Merisaukan*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Solichah, Z. (2019, November 28). www.antaraneews.com/berita/1185132/pusat-studi-dan-akademisi-mengkritik-skb-penanganan-radikalisme. Retrieved from antaraneews.com.
- Widiari, G. T. (2020, September 08). <https://era.id/nasional/37387/menteri-agama-salahkan-tjahjo-kumolo-karena-publikasikan-radikalisme-%E2%80%A6>. Retrieved from era.id.